

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

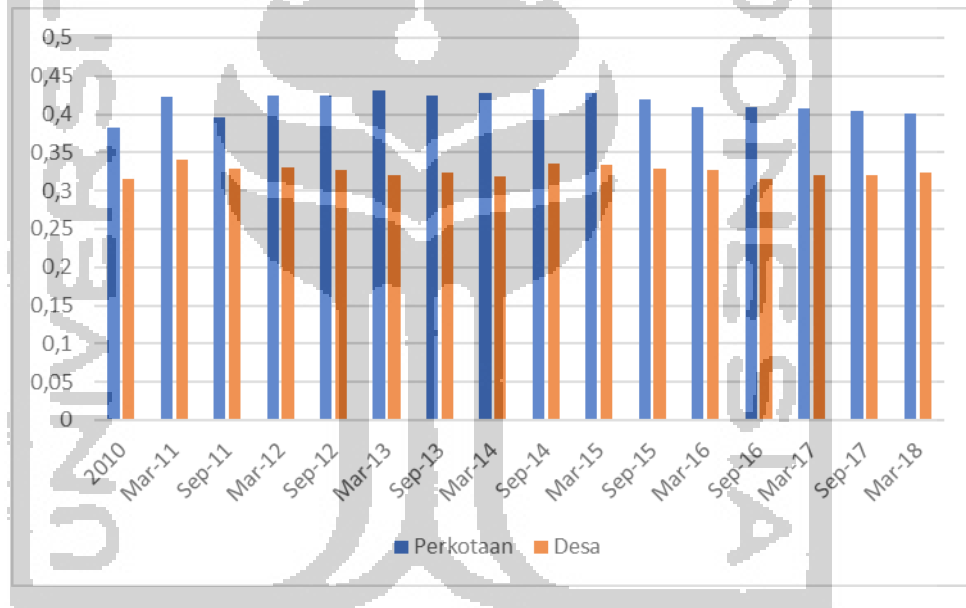
Dua dekade terakhir masalah ketimpangan pembangunan menjadi fokus pemerintah untuk dapat ditanggulangi. Padahal, pembangunan dan pemerataan telah memasuki masa transisi dimana pembangunan dapat tercipta dan mendukung kegiatan ekonomi yang ada. Arsyad (1999:74) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengelola sumberdayanya serta menciptakan kerja sama dengan swasta dalam membentuk lapangan kerja sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang pada wilayah tersebut.

Menurut Rubiarko (2013), dalam proses pertumbuhan ekonomi yang tidak mengikutkan pemerataan ekonomi di dalamnya akan membuat suatu titik dimana akan memisahkan suatu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya. Sebaliknya apabila pemerataan ekonomi tidak bertuju pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan gelombang kemiskinan yang ada di lapisan masyarakat.

Kedua hal yang ada pada tujuan ekonomi ini menjadi permasalahan utama yang ada pada negara-negara berkembang. Hal tersebut dirasakan menjadi sangat kompleks dikarenakan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di rasa sangat penting namun sangat sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Menurut Sodik (2007) pertumbuhan ekonomi ditentukan hasil dari keseluruhan pola regional yang terbentuk dari kegiatan sosial dan ekonomi sehingga membentuk suatu tujuan yang menjadi cerminan regional tersebut dan mempengaruhi aspek aspek atau kualitas

regional itu sendiri seperti angkatan kerja, pola tingkah laku sosial, sumber daya manusianya, tingkat inflasi dan ekspor netto.

Menurut Kuncoro (2004:203) terdapat dua jenis ketimpangan yang dapat diperhatikan. Yang pertama ialah ketimpangan yang terdapat pada distribusi pendapatan yang ada pada golongan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks gini (*gini ratio*). Pada indeks gini dapat diperhatikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang berbeda di setiap golongannya.



Sumber data: Diolah dari data BPS

Gambar 1.1

Perkembangan Gini Ratio, 2010 – 2018

Diketahui bahwa pola ketimpangan yang ada pada golongan masyarakat di Indonesia mengalami fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2010 hingga 2018 mengalami peningkatan ketimpangan nasional. Diketahui bahwa pada tahun 2011 angka ketimpangan nasional 0,387 naik menjadi 0,41. Angka tersebut pun terus mengindikasikan adanya fluktuasi yang ada pada ketimpangan pendapatan di Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut memiliki arti bahwa kegiatan ekonomi yang ada di perkotaan dan perdesaan mempengaruhi pergerakan ketimpangan ini.

Yang kedua yaitu ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah penting untuk diamati. Dalam kegiatan ekonomi, regional atau daerah berperan sebagai daya tarik atau gravitasi ekonomi. Namun, menurut Kuncoro (2006:223) Kawasan Barat Indonesia (KBI) menjadi gravitasi ekonomi yang ada di Indonesia selama 50 tahun terakhir. Implikasi ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat maka akan berbanding positif dengan laju ketimpangan pendapatan per kapita di suatu negara. Menurut Todaro (2014:219) pada titik awal dari sebuah pembangunan dapat dicirikan dengan meningkatnya pendapatan. Keberhasilan tahap pertama ini juga diiringi dengan meningkatnya Indeks Gini yang berdistribusi dari tingkat pendapatan.

Secara geografis, Pulau Sumatera dan Jawa ialah penyumbang terbesar pembangunan. Tercatat, lebih dari setengah PDB Nasional hanya dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Pasca otonomi daerah diresmikan, ketimpangan antar daerah terus meningkat. Sumbangan PBRD perkapita yang hanya terpusat pada daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga

kepadatan penduduk dan penggunaan sumberdaya alam yang semakin besar. Akibat dari hal tersebut adalah tingkat PDRB per kapita yang tidak merata antar provinsi mengakibatkan pembangunan tidak merata dan meyebabkan ketimpangan.

Tabel 1.1
Distribusi PDB Nasional (%) Menurut Pulau Tahun 2012-2014

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera	23,74	23,81	23,83	21,6	22,03	21,66
Jawa	57,65	57,99	57,78	56,8	58,49	58,4
Bali dan Nusa Tenggara	2,51	2,53	2,54	5,5	3,13	3,54
Kalimantan	9,3	8,67	8,52	6	7,85	8,2
Sulawesi	4,74	4,82	4,9	7,4	6,04	6,1
Maluku dan Papua	2,06	2,18	2,43	2,7	2,46	2,1
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan sumbangan Pulau Jawa yang selalu menyumbang lebih dari setengah distribusi PDB Nasional secara keseluruhan. Hal ini berbanding terbalik dengan pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, pada tahun 2016 hanya menyumbang 19,48% dari total keseluruhan PDB Nasional pada tahun tersebut. Angka tersebut memiliki menyatakan bahwa adanya ketimpangan antar regional yang terjadi sehingga mengakibatkan sumbangan PDB yang berbeda pada setiap regionalnya.

Di tingkat regional ketimpangan terjadi pada pulau-pulau di Indonesia. Penyumbang PDB terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa sendiri terdapat perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi di dalamnya. Data mencatat penyumbang

pendapatan per kapita terbesar pada Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh Jawa Timur di mana sentra mega industri terpusat pada dua lokasi tersebut.

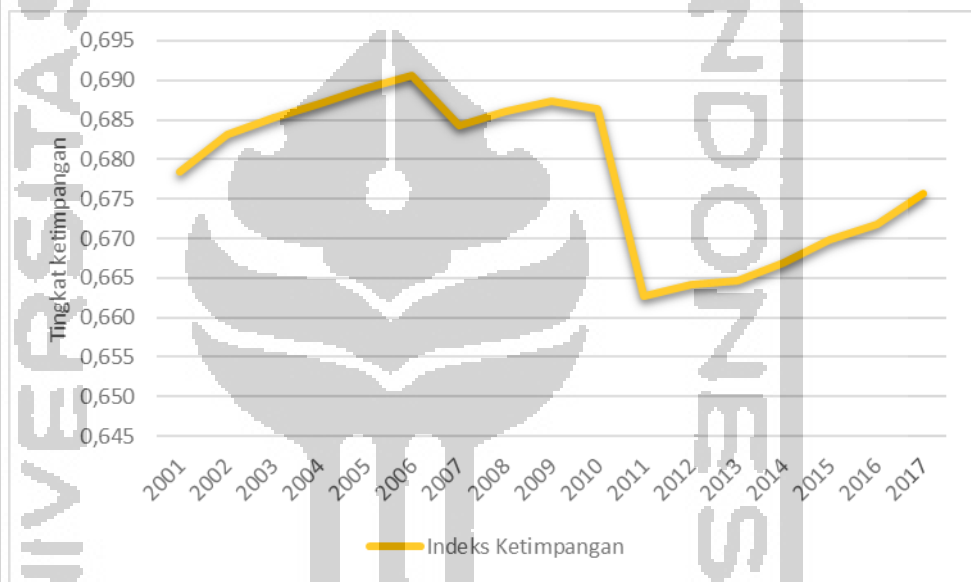
Tabel 1.2
PDRB per Kapita Tahun 2000, 2010, dan 2017 (dalam ribu rupiah)

Wilayah	Tahun		
	2000	2010	2017
DKI JAKARTA	77.148	116.567	170.263
JAWA BARAT	12.461	17.004	31.192
JAWA TENGAH	14.634	23.004	27.608
DI YOGYAKARTA	18.010	25.379	26.695
JAWA TIMUR	16.710	26.107	39.548
BANTEN	20.031	25.527	38.558

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta tercatat mendapatkan poin tertinggi jauh dari daerah lain. Sementara itu, Jawa Timur yang memiliki PDRB posisi kedua setelah DKI Jakarta apabila dilihat dari pendapatannya tidak terlalu mendominasi Pulau Jawa dalam perolehannya. Diketahui bahwa nilai pendapatan per kapita DKI Jakarta tercatat hampir tiga kali lipatnya dari daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Hal ini dapat diketahui nilai 170.263 ribu rupiah sangat mendominasi daerah lain yang hanya mencatatkan dalam angka tidak lebih dari 40.000 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa itu sendiri. Andil daerah dalam penyumbang PDB Nasional juga hanya didominasi oleh beberapa provinsi yang ada di dalamnya.

Kontribusi yang ada tidak membuat Pulau Jawa terlepas dari belenggu ketimpangan. Dengan melihat tingkat ketimpangan dari koefisien Indeks Williamson, tingkat ketimpangan pembangunan yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan setiap kegiatan pembangunan yang ada di Pulau Jawa belum dapat menuntaskan ketimpangan pembangunan.



Sumber data: BPS diolah

Gambar 1.2

Williamson Index Pulau Jawa

Gambar 1.2 menunjukkan penurunan tingkat ketimpangan namun cenderung mendekati angka 1 (dimana IW mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi dan IW mendekati 0 maka semakin rendah). Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan ekonomi yang cukup besar pada wilayah tertentu tidak menjamin tingkat ketimpangan antar daerah tidak dapat dihindari adanya.

Tabel 1.3

Kepadatan penduduk (jiwa/km²)

Provinsi	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)		
	2000	2010	2015
DKI Jakarta	12592	15015	15328
Jawa Barat	1010	1282	1320
Jawa Tengah	952	1014	1030
DI Yogyakarta	996	1147	1174
Jawa Timur	727	803	813
Banten	838	1185	1237
Pulau Jawa	17115	20446	20902

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2019

Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa tercatat menjadi paling besar di Indonesia. Menurut data sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa setiap tahunnya meningkat. Angka tersebut menjelaskan bahwa perekonomian nasional pun terpusat pada Pulau Jawa. Jumlah kepadatan yang terus bertambah dibandingkan dengan indeks ketimpangan pembangunan pada Gambar 1.2 menunjukkan adanya hubungan yang kesinambungan sehingga disaat kepadatan penduduk semakin bertambah, maka tingkat ketimpangan terus bertambah seiring waktunya.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatannya selalu terjadi. Dengan hal ini pemerintah dapat bersikap adil dengan mendorong aspek-aspek yang ada pada setiap lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan kesejahteraan yang ada pada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang terus

menerus terjadi akan menyebabkan kesenjangan antar daerahnya sehingga timbul ketidakpercayaan pada pemerintah dan penumpukan kepadatan masyarakat pada satu lokasi tetap. Dan hal tersebut dapat meningkatkan resiko pada pembangunan daerah yang kepadatan penduduknya terus meningkat tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diduga telah terjadi ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “*Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2001-2017*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini. Berikut ialah rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah tingkat PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?
3. Apakah rasio penduduk kota berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut ialah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisa hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa.
2. Menganalisa hubungan antara PDRB dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa
3. Menganalisa hubungan antara rasio penduduk kota dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak. Berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan penulis untuk beberapa pihak tersebut, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media menyebarkan pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi khususnya dalam pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Serta sebagai media dalam penerapan ilmu yang penulis sudah dapatkan selama di bangku kuliah kepada khalayak publik.
2. Bagi pihak pemerintah daerah, dalam penelitian ini dapat menggambarkan implikasi ketimpangan terhadap daerah sehingga dapat memilih kebijakan yang tepat dalam penerapannya pada kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitiannya yang selaras dan sejalan dengan penelitian ini sehingga manfaat pertama dapat terus dikembangkan dan menyebar luas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Bagian tersebut berisi tentang kajian hasil – hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

2. Landasan Teori

Berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti. Landasan teori tersebut digunakan untuk memberikan pengertian dan konklusi hubungan antara variabel terkait.

3. Hipotesis

Berisi tentang rumusan sementara dari masalah yang disesuaikan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada. Hipotesis disusun dan membentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III Metode Penelitian akan dijelaskan bagaimana metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bab ini juga akan dijelaskan secara

sistematika bagaimana hipotesis dapat terbentuk nantinya sehingga dapat di bahas dan dijelaskan di bab selanjutnya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari hasil yang telah dilakukan ujinya menggunakan metode yang di jelaskan pada BAB III Metode Penelitian. Pembahasan hasil dari metode tersebut nantinya akan diselaraskan dengan hipotesis awal yang dibentuk di BAB II sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini nantinya diharapkan menjadi salah satu sumber yang relevan digunakan.